

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI UJUNG KARANGASEM)

Nyoman Yudiarini^{1*)}, Putu Lasmi Yuliyanthi Sapanca²⁾

¹²⁾ Fakultas Pertanian, Unmas Denpasar

*Coressponding Author: yudiarini@unmas.ac.id

ABSTRACT

Secara implisit program kebijakan pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (dan atau mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan) melalui usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pemerataan dalam memperoleh keadilan. Program pengembangan usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai departemen meliputi, PDM-DKE, P3T, PDKMK, P4K, PHBK, dan KUBE. Melalui berbagai program tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa para nelayan miskin di Pantai Ujung Karangasem telah pernah mengenyam berbagai penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan serta bantuan permodalan dari pemerintah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei. Survei akan dilaksanakan di Pantai Ujung Karangasem. Pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling Terquota dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kebijakan program penanggulangan kemiskinan efektivitasnya berada dalam kategori tinggi. Efektivitas program penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan factor umur dan jumlah anggota keluarga nelayan. Ada kecenderungan nelayan yang berumur lebih muda memiliki ketercapaian efektivitas program yang lebih tinggi, demikian juga nelayan yang anggota keluarganya lebih banyak memiliki kecenderungan lebih tinggi efektivitasnya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Keywords: Efektivitas kebijakan, Nelayan, Penanggulangan kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia sejak Repelita I telah memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kemiskinan dalam bentuk pembangunan desa, baik melalui program sektoral, regional, maupun program inpres. Hal ini dilakukan, karena pembangunan desa memegang peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan dan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai pusat segenap upaya pembangunan. Sebagai sasaran dalam pembangunan, manusia harus dibangun kehidupannya sekaligus merupakan sumber daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kemampuannya untuk mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai segi kehidupan.

Secara implisit program kebijakan pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (dan atau

mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan) melalui usaha pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan penyebaran pembangunan, pemerataan memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pemerataan dalam memperoleh keadilan. Walaupun berbagai upaya dan kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah, namun tingkat kesejahteraan masih belum merata. Hal ini dapat dilihat dari realitas yang ada, dimana masih ada daerah yang kondisi sosialnya masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Dengan kata lain, belum meratanya tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini menjadi agenda penting dalam pembangunan dan pemerintah selalu berusaha memperbaiki kondisi sosial ekonomi daerah-daerah yang masih tertinggal.

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya, namun kebijakan reguler, sektoral dan regional yang dilaksanakan sejak tahun 1970-an hingga sekarang belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang pada tahun 2002 masih berkisar 40 juta jiwa (Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, 2002). Kondisi kemiskinan tersebut juga ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat masih tingginya keluarga yang tergolong keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera Tahap I alasan ekonomi sebanyak 15.135.561 KK (30,52 %) dari total keluarga 49.597.472 KK (BKKBN Pusat, 2012)

Dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali telah dilakukan langkah-langkah melalui berbagai program, salah satunya adalah, Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra-Sejahtera berupa bantuan Pemerintah untuk pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif kepada keluarga pra sejahtera. Program pengembangan usaha ekonomi produktif yang telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui berbagai departemen meliputi, PDM-DKE, P3T, PDKMK, P4K, PHBK, dan KUBE. Melalui berbagai program tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa para nelayan miskin di Pantai Ujung Karangasem telah pernah mengenyam berbagai penyuluhan, pelatihan, dan pembinaan serta bantuan permodalan dari pemerintah. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa jumlah mereka cenderung bertambah setiap tahun. Ironis memang, tetapi itulah kondisi faktual yang tak terbantahkan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan kelompok nelayan di Pantai Ujung Karangasem.
2. Menganalisis factor-faktor yang ada hubungannya dengan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan di Pantai Ujung Karangasem.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei. Survei akan dilaksanakan di Pantai Ujung Karangasem.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan yang perahunya mangkal di Pantai Ujung Karangasem yang berjumlah 347 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling Terquota dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan responden menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Data sekunder dikumpulkan dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Karangasem, BPS Kabupaten Karangasem.

Definisi Operasional

Beberapa istilah yang terlibat dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nelayan miskin adalah keluarga yang masih tergolong keluarga pra KS dan KS tahap I.
- 2) Keluarga sejahtera adalah keluarga yang cukup sandang pangan, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak ideal, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Modal bergulir adalah modal usaha yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu, yang pengembaliannya dilakukan dengan cara menggulirkan kepada kelompok lainnya.
- 4) Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lain dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan atau tambahan pengetahuan tentang berbagai hal yang terkait dengan bidang usaha ekonomi produktif.
- 5) Pembinaan adalah suatu kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lain dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif.
- 6) Pelatihan adalah suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lain dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat khususnya yang tergabung dalam kelompok usaha ekonomi produktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dikatakan efektif jika mampu memberikan peningkatan pendapatan masyarakat peserta program secara signifikan. Untuk memastikan tingkat efektivitas program penanggulangan kemiskinan, maka dilakukan pengukuran terhadap empat variabelnya, yaitu variabel konteks, input, proses, dan produk.

Variabel konteks. Variabel ini diukur dari empat indikatornya, yang meliputi (a) ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan, (b) metode yang digunakan, (c) pendekatan yang digunakan, dan (d) tujuan program penanggulangan kemiskinan. Sebagian terbesar responden (43,33%) berada dalam kategori tinggi persepsinya terhadap ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian sebanyak 46,67% responden berada dalam kategori rendah dan sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih relatif banyak responden yang rendah persepsinya terhadap ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan. Diperlukan terobosan yang lebih intensif untuk mengkomunikasikan ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan kepada nelayan miskin. Pemilihan waktu yang tepat sesuai dengan waktu luang nelayan sangat penting dipertimbangkan agar ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan dapat dipersepsikan secara baik oleh responden.

Metode yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan juga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Sebagian besar responden (53,33%) berada dalam kategori tinggi persepsinya terhadap metode yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Kondisi faktual menyiratkan bahwa masih relatif banyak responden yang berada dalam kategori rendah dan sangat rendah persepsinya terhadap metode yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan. Pemilihan metode selanjutnya diorientasikan pada kompetensi sasaran, sehingga capaian kinerja menjadi lebih tinggi. Metode yang digunakan harus mampu memberikan arahan bagaimana tujuan program penanggulangan kemiskinan dicapai, dan apa solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan program secara lebih efektif dan efisien.

Disamping metode yang digunakan, pendekatan juga sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Ada banyak pendekatan yang dapat dipilih untuk memberikan hasil optimal bagi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Orientasi pemilihan pendekatan selanjutnya diabdikan bagi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin sasaran.

Ditinjau dari sisi pendekatan yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan ternyata sebagian besar responden berada dalam kategori tinggi persepsinya terhadap pendekatan tersebut. Di samping itu, ternyata sebanyak 16,67% responden telah berada dalam kategori sangat tinggi persepsinya terhadap pendekatan yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan. Fakta ini memberikan makna bahwa responden merasa nyaman dan bisa menerima pendekatan yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan.

Sebagian besar responden (80%) berada dalam kategori tinggi persepsinya terhadap tujuan program penanggulangan kemiskinan. Responden telah memahami dan mempersepsikan positif tujuan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan tersebut. Derap langkah penduduk sasaran program akan bersinergi dengan pelaksana program dalam meniti jalan pencapaian tujuan program penanggulangan kemiskinan sehingga tingkat pencapaiannya menjadi lebih tinggi. Tujuan program menjadi fokus bagi pelaksana program dan peserta program untuk dicapai dengan cara kerja yang lebih berhasil guna. Pelaksana program selanjutnya memberikan arahan bagaimana proses pencapaian tujuan program tersebut, dan memberikan solusi yang tepat untuk mencapainya. Tujuan program telah terinternalisasikan dengan baik oleh pelaksana dan peserta program penanggulangan kemiskinan. Hanya segelintir peserta program yang rendah persepsinya terhadap tujuan program penanggulangan kemiskinan.

Peserta program telah mempersepsikan variabel konteks dalam kategori tinggi. Dengan demikian konteks program penanggulangan kemiskinan telah dipersepsikan baik oleh peserta program.

Berdasarkan persepsi responden terhadap empat indikator variabel konteks,

menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian skor terendah terjadi pada indikator ketentuan dasar program dan rata-rata pencapaian skor tertinggi terjadi pada indikator tujuan program penanggulangan kemiskinan. Ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan memiliki rata-rata pencapaian skor terendah diakibatkan oleh pemahaman peserta program penanggulangan kemiskinan yang kurang memadai terhadap ketentuan dasar program tersebut. Kondisi demikian tidak terlepas dari sosialisasi yang menyangkut ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan yang belum memadai menurut penilaian peserta. Kemampuan peserta menangkap penjelasan yang disampaikan oleh petugas masih sangat terbatas. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan formal peserta program penanggulangan kemiskinan. Diperlukan terobosan yang lebih sistematis untuk mendesiminasikan ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan di kalangan peserta, sehingga pemahaman mereka terhadap ketentuan dasar program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih baik dan tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Dalam kasus ini lingkaran setan kemiskinan terbukti di lapangan.

Rata-rata persentase pencapaian skor terhadap skor maksimal dari aspek ketentuan dasar sebagai indikator variabel konteks sebesar 60,83% yang berada dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ketentuan dasar sebagai indikator variabel konteks masih perlu dikomunikasikan secara lebih jelas. Sementara itu, aspek metode yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan sebagai indikator variabel konteks mencapai skor rata-rata sebesar 2,4, dengan persentase pencapaian skor terhadap skor maksimal sebesar 60% yang berada dalam kategori rendah. Pendekatan yang digunakan dalam program penanggulangan kemiskinan rata-rata pencapaian skor sebesar 71,5% yang berada dalam kategori tinggi. Aspek tujuan program penanggulangan kemiskinan berada pada peringkat tertinggi dalam perolehan skor rata-rata yang mencapai 2,86 dengan persentase pencapaian skor sebesar 71,66% yang berada dalam kategori tinggi. Kenyataan ini memberikan makna bahwa tujuan program penanggulangan kemiskinan telah dipersepsikan secara baik oleh responden. Melalui pemahaman yang baik terhadap tujuan program, maka peserta program

penanggulangan kemiskinan memiliki arah yang jelas untuk mensukseskan program tersebut. Secara keseluruhan variabel konteks mencapai rata-rata skor sebesar 2,67 dengan persentase pencapaian skor terhadap skor maksimal sebesar 66,67% yang berada dalam kategori tinggi. Persentase pencapaian skor variabel konteks menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan telah memiliki pemahaman yang memadai terhadap indikator-indikator variabel konteks. Oleh karena itu, meningkatkan capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, maka pengelola program melalui aktivitas kesehariannya berkewajiban lebih giat mendesiminasikan indikator variabel konteks.

Variabel input

Untuk kesuksesan sebuah program, maka inputnya harus memenuhi syarat yang baik. Melalui input yang baik diharapkan menghasilkan keluaran yang baik. Input dari program penanggulangan kemiskinan meliputi (1) SDM, (2) sosialisasi program, (3) pengelolaan program, dan (4) tersedianya dana.

Sumberdaya manusia sebagai indikator variabel input program penanggulangan kemiskinan memegang peranan penting bagi keberhasilan program tersebut. Sumberdaya manusia merupakan subyek dan obyek program penanggulangan kemiskinan. Tingkat kompetensi sumberdaya manusia berhubungan erat dengan pencapaian kinerja penanggulangan kemiskinan. Dari sisi sumberdaya manusia, efektivitas program penanggulangan kemiskinan dipersepsikan berada dalam kategori tinggi. Masyarakat nelayan memandang bahwa pelaksana program penanggulangan kemiskinan memiliki kompetensi yang memadai.

Efektivitas program penanggulangan kemiskinan juga sangat ditentukan oleh gencarnya kegiatan sosialisasi. Rasa memiliki dan keterlibatan dalam program penanggulangan kemiskinan tergantung pada keberhasilan kegiatan sosialisasi. Pemahaman masyarakat nelayan terhadap program memberikan kontribusi terhadap partisipasinya dalam implementasi program. Sumbatan informasi selayaknya dieliminasi untuk memastikan bahwa program akan berhasil dengan baik. Sebagian besar masyarakat nelayan mempersepsikan kegiatan sosialisasi berada dalam kategori rendah

efektivitasnya dalam program penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan program dipersepsikan oleh masyarakat nelayan berada dalam kategori tinggi efektivitasnya terhadap program penanggulangan kemiskinan. Hal ini merupakan sinyal positif bagi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sehingga masyarakat nelayan secara gradual dan mantap dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Ada harapan besar, program penanggulangan kemiskinan menjadi efektif, jika pengelolaan program berjalan secara optimal.

Variabel yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya dana. Ketika dana menjadi faktor pembatas, maka keberlangsungan dan keberhasilan program akan menuai kendala, bahkan bisa macet tidak terkendali. Faktor pendanaan yang memadai menjadi kunci sukses keberhasilan program. Banyak sentuhan dan insentif yang bisa diberikan kepada masyarakat nelayan miskin jika tersedia dana yang memadai. Walaupun sesungguhnya pengentasan kemiskinan tidak ditujukan untuk memanjakan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan langsung tunai, namun bantuan langsung tunai memberikan insentif yang tinggi bagi peserta program penanggulangan kemiskinan.

Ketersediaan dana menjadi faktor pembatas program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat nelayan. Kurang tersedianya dana secara memadai menjadi pemicu keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak optimal. Secara keseluruhan variabel input dipersepsikan tinggi efektivitasnya terhadap program penanggulangan kemiskinan.

Rata-rata pencapaian skor aspek SDM sebagai indikator variabel input mencapai 2,9 dengan persentase pencapaian skor terhadap skor maksimal sebesar 72,5% yang berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa aspek SDM sebagai input dari program penanggulangan kemiskinan telah memadai menurut persepsi peserta atau sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Aspek sosialisasi sebagai input program penanggulangan kemiskinan belum dipersepsikan memadai oleh peserta atau sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor yang dicapai dari aspek sosialisasi sebagai indikator variabel input sebesar 2,4 dengan persentase pencapaian skor terhadap skor maksimal sebesar 60% yang berada dalam kategori rendah. Aspek sosialisasi masih perlu digelorkan untuk mampu memberikan kesadaran yang semakin bertambah terhadap keberadaan program penanggulangan kemiskinan di kalangan peserta program.

Aspek pengelolaan program sebagai indikator variabel input program penanggulangan kemiskinan telah dipersepsikan tinggi efektivitasnya oleh responden. Pengelolaan program di mata responden telah memenuhi unsur transparansi dan akuntabilitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata skor yang dicapai pada aspek pengelolaan program sebesar 2,9 dengan persentase pencapaian skor sebesar 72,5% yang berada dalam kategori tinggi.

Keberhasilan program sangat ditentukan oleh tersedianya dana. Menurut penilaian responden, program penanggulangan kemiskinan belum menyediakan dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut. Hal ini dibuktikan dari besarnya rata-rata pencapaian skor pada aspek tersedianya dana sebagai indikator variabel input dari program penanggulangan kemiskinan mencapai 2,1 dengan persentase pencapaian skor sebesar 52,5% yang berada dalam kategori rendah.

Secara keseluruhan variabel input berada dalam kategori tinggi efektivitasnya menurut penilaian responden dengan persentase pencapaian skor sebesar 65,83%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel input program penanggulangan kemiskinan telah memadai dari kacamata responden. Namun demikian untuk pencapaian keberhasilan yang lebih tinggi, maka kualitas variabel input masih perlu ditingkatkan lagi.

Variabel proses

Dalam rangka mencapai luaran kegiatan, maka diperlukan proses untuk mengolah input menjadi output kegiatan. Kualitas output sangat ditentukan oleh kualitas proses yang ada di hulunya. Variabel proses program penanggulangan kemiskinan diukur dari indikatornya yang meliputi (a) perencanaan program, (b) penyaluran bantuan, (c) pemanfaatan bantuan, dan (d) monitoring dan evaluasi.

Sebagian terbesar responden berada dalam kategori tinggi persepsinya terhadap perencanaan program penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, secara rata-rata persepsi responden terhadap perencanaan program berada dalam kategori rendah. Hal ini memberi makna bahwa perencanaan program perlu dibenahi secara seksama agar menjadi lebih baik dimata masyarakat nelayan miskin.

Proses penyaluran bantuan menjadi titik krusial penilaian peserta program, karena selama ini program pemberdayaan masyarakat selalu dipersepsikan identik dengan bantuan langsung baik tunai ataupun non tunai. Ketika penyaluran bantuan tidak sesuai dengan persepsi dan kepentingan penerima bantuan (masyarakat nelayan miskin), maka secara keseluruhan program dinilai tidak baik. Namun secara rata-rata pencapaian skor terhadap skor maksimal sebesar 60% yang berada dalam kategori rendah. Hal ini memberi makna bahwa penyaluran bantuan secara umum dipersepsikan rendah efektivitasnya terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Persepsi dan kepentingan peserta program selama ini terpaku pada besaran dana yang disalurkan, sehingga ketika dananya tidak sesuai dengan yang dipersepsikan, maka dikonotasikan programnya tidak baik.

Hal krusial yang sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah pemanfaatan bantuan. Secara normatif bantuan harus dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis, dan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk teknis, maka selayaknya ada pendampingan. Fakta yang ditunjukkan pada Rata-rata pencapaian skor indikator pemanfaatan bantuan mencapai 2,97 dengan pencapaian skor 74,16% yang berada dalam kategori tinggi.

Untuk memastikan bahwa program berlangsung dengan baik, maka diperlukan tindakan monitoring dan evaluasi. Pengawasan pelaksanaan program menjadi salah satu kunci sukses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Niat baik untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat nelayan miskin untuk dapat keluar dari perangkap kemiskinan perlu diberikan apresiasi yang tinggi oleh segenap stakeholders.

Variabel proses secara keseluruhan telah dipersepsikan berada dalam kategori tinggi oleh responden. Proses program penanggulangan kemiskinan telah dinilai sesuai dengan yang dipersyaratkan sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa program tersebut tidak atau kurang berdampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan. Proses yang dijalankan dalam program penanggulangan kemiskinan telah dipersepsikan berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen pelaksana dan peserta yang senantiasa bersinergi untuk mensukseskan program penanggulangan kemiskinan. Kelemahan dalam proses pelaksanaan mungkin saja masih terjadi, namun secara keseluruhan telah dinilai berjalan dengan baik.

Jika dikomparasikan masing-masing indikator variabel proses, maka perencanaan program ternyata memiliki rata-rata pencapaian skor yang paling rendah yaitu sebesar 2,37 diantara empat indikator dari variabel proses. Persentase pencapaian skor terhadap skor maksimal dari aspek perencanaan program sebesar 59,17% yang berada dalam kategori rendah. Aspek pemanfaatan bantuan sebagai indikator variabel proses menempati ranking tertinggi dalam perolehan nilai rata-rata pencapaian skor sebesar 2,97 dengan persentase pencapaian skor sebesar 74,17% yang berada dalam kategori tinggi. Secara keseluruhan variabel proses memiliki rata-rata pencapaian skor sebesar 2,93 dengan persentase pencapaian skor sebesar 73,33% yang berada dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel proses program penanggulangan kemiskinan telah dipersepsikan memadai oleh responden. Responden sangat mengapresiasi bahwa program penanggulangan kemiskinan dirancang bangun dan dilaksanakan dengan proses yang transparan.

Variabel produk

Variabel produk indikatornya hanya satu yaitu ada tidaknya peningkatan pendapatan. Semua responden menyatakan bahwa setelah mengikuti program penanggulangan kemiskinan, pendapatannya meningkat secara signifikan dari sebelumnya. Bantuan langsung berupa sarana penangkapan ikan (jaring dan perahu tempel) dinilai sangat membantu meningkatkan hasil tangkapan ikan yang

kemudian bermuara pada meningkatnya pendapatan keluarga nelayan.

Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Secara Total

Secara keseluruhan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan telah berada dalam kategori tinggi, dengan rata-rata pencapaian skor terhadap skor maksimal sebesar 71,67%.

Walaupun masih ada responden yang menilai bahwa program penanggulangan kemiskinan sangat rendah efektivitasnya, namun jumlah mereka sangat kecil sehingga hal tersebut tidak mengurangi nilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Persepsi mereka diduga karena kegagalannya dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan sehingga kurang memberikan manfaat ekonomi kepada keluarganya.

Faktor-Faktor Yang Ada Hubungannya dengan Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Sejumlah factor yang diduga ada hubungannya dengan efektivitas penanggulangan kemiskinan adalah factor umur, pendidikan, dan jumlah anggota keluarga. Hasil analisis Chi-Square menunjukkan bahwa hanya factor umur dan jumlah anggota keluarga yang berhubungan nyata dengan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, sedangkan factor pendidikan tidak berpengaruh nyata.

a. Umur responden; Umur responden mempunyai hubungan yang signifikan dengan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa ada suatu kecenderungan bahwa pada responden (nelayan) yang berumur lebih tua memiliki efektivitas program yang lebih rendah atau pada responden yang berumur lebih muda memiliki efektivitas program yang lebih tinggi. Kenyataan ini memberi makna bahwa ada kecenderungan nelayan yang berumur lebih muda lebih giat dan lebih profesional melaksanakan kegiatan program penanggulangan kemiskinan.

b. Pendidikan formal; Pendidikan formal tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan nelayan yang mempunyai pendidikan formal lebih rendah, mempunyai ketercapaian efektivitas program yang lebih

tinggi atau lebih rendah daripada nelayan yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi, demikian sebaliknya. Jadi, efektivitas program yang tinggi atau rendah dapat dijumpai pada sembarang pendidikan formal.

c. Jumlah anggota keluarga; Jumlah anggota keluarga mempunyai hubungan yang signifikan dengan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dengan keeratan hubungan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan pada nelayan yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar memiliki efektivitas program yang lebih tinggi dari petani yang mempunyai anggota keluarga lebih kecil, demikian sebaliknya. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan keluarga yang lebih besar pada nelayan yang mempunyai anggota keluarga lebih banyak, sehingga mengharuskan dirinya untuk lebih tanggap terhadap program penanggulangan kemiskinan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan program penanggulangan kemiskinan efektivitasnya berada dalam kategori tinggi. Efektivitas program penanggulangan kemiskinan berhubungan dengan factor umur dan jumlah anggota keluarga nelayan. Ada kecenderungan nelayan yang berumur lebih muda memiliki ketercapaian efektivitas program yang lebih tinggi, demikian juga nelayan yang anggota keluarganya lebih banyak memiliki kecenderungan lebih tinggi efektivitasnya dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkelanjutan untuk membantu nelayan yang berumur relative lebih tua agar mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan.

5. REFERENSI

- BKKBN Propinsi Bali, 2014. Sekilas Pendataan Keluarga dan Hasilnya Di Propinsi Bali Tahun 2003, Denpasar.
- BKKBN Propinsi Bali, 2013. Sekilas Pendataan Keluarga dan Hasilnya Di Propinsi Bali Tahun 2012, Denpasar.

- BKKBN Pusat, 1996. Pedoman Pelaksanaan Sub Sistem Penilaian Efek dan Dampak Program KB Nasional Terhadap Fertilitas, Jakarta.
- DEPDAGRI, 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal, Badan Perencanaan Departemen Dalam Negeri Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI., 2014. Panduan Umum Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Direktorat Jenderal Bantuan Dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI., Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004. Akar Kemiskinan Dan Ketidakberdayaan Masyarakat, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1977. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Gramedia.
- Mubyarto, 2000. Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta.
- Mubyarto, 1998. Ekonomi Rakyat Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, Yogyakarta, Aditya Media.
- Mubyarto, 1994. Profil Desa Tertinggal 1994, Aditya Media Yogyakarta.
- Putong, Iskandar, 2000. Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sajogyo, 1999. Memacu Perekonomian Rakyat. Aditya Media, Yogyakarta.
- Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia, 2002. Buku Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- Sekretariat Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1994. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta.